

**KURIKULUM DAN GURU SEJARAH TINGKAT SEKOLAH
MENENGAH ATAS (SMA) DI TAKALAR,
SULAWESI SELATAN 2004-2018**

***Curriculum and History Teachers for Senior High School (SMA) in Takalar,
South Sulawesi 2004-2018***

Rismawidiawati

Balai Arkeologi Provinsi Sulawesi Selatan

Jl. Pajjaiang No.13, Sudiang Raya, Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan

Email: rismawidiawatigmail.com

rismawidiawatikemdikbud.go.id

Naskah diterima 23-11-2021. Naskah direvisi 30-11-2021. Naskah disetujui 10-12-2021

Abstract

Learning Indonesian history has progressed significantly in tandem with changes in the education curriculum and broader socio-political changes. Three curriculum modifications occurred between 2004 and 2013, culminating in “change ministers, change curriculum.” This term isn’t wholly incorrect because the government uses “trial and error” in curriculum development. This situation has ramifications for high school history classes, as teachers are dealing with curriculum modifications. This study describes the challenges faced by history teachers in the learning process on a more practical level, namely in the classroom, using the High School (SMA) case in Takalar, South Sulawesi. Using a historical methodology that stresses the process, this study explores teachers’ responses to curricular changes and the extent to which the role of the History Subject Teacher Consultation (MGMP) in resolving every difficulty faced by history teachers in Takalar Regency. According to the findings, history teachers are severely limited in meeting the administrative parts of learning in the K13 curriculum. They are engaged with administrative tasks, therefore learning material is frequently overlooked. From a conceptual viewpoint, teachers do not object to current curriculum changes, which their argumentation can explain based on historical knowledge, but current curriculum changes only emphasize administrative achievement targets over achieving a level of student understanding of a subject matter. The MGMP of History in Takalar actively assists history teachers with administrative responsibilities and improving their teaching abilities. Teachers have benefited immensely from MGMP’s ability to share information, experiences, teaching materials, and other learning-related items.

Keywords: Curriculum, history teacher, MGMP, Takalar, High School.

Abstrak

Pembelajaran sejarah Indonesia telah mengalami perjalanan panjang seiring dengan perubahan kurikulum pendidikan serta perubahan sosial politik dalam konteks lebih luas. Sejak tahun 2004 sampai 2013, telah terjadi perubahan kurikulum sebanyak tiga kali sehingga muncul suatu ungkapan “ganti menteri ganti kurikulum”. Ungkapan ini tidak sepenuhnya keliru karena memang pemerintah cenderung menerapkan “uji coba dan gagal” dalam penyusunan kurikulum. Kondisi ini berimplikasi pada pembelajaran sejarah di tingkat SMA, di mana para guru menghadapi permasalahan terhadap perubahan kurikulum. Penelitian ini mengurai masalah yang dihadapi oleh guru sejarah dalam proses pembelajaran di tingkat lebih praktis, yaitu di kelas dengan mengambil kasus Sekolah Menengah Atas (SMA) di Takalar, Sulawesi Selatan. Dengan menggunakan metodologi sejarah, menekankan pada proses, penelitian ini melihat respon guru terhadap perubahan kurikulum dan sejauh mana peran Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) sejarah dalam mengatasi setiap masalah yang dihadapi oleh guru-guru sejarah di

Kabupaten Takalar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para guru sejarah terkendala serius dalam memenuhi unsur administrasi pembelajaran pada kurikulum K13. Mereka lebih disibukkan dengan tuntutan administratif sehingga konten pembelajaran sering terabaikan. Secara konseptual, guru tidak keberatan dengan situasi perubahan kurikulum yang dapat dijelaskan argumentasinya dengan kapasitas pengetahuan sejarah yang mereka miliki, tetapi perubahan kurikulum yang ada hanya menekankan target pencapaian administrasi dibandingkan dengan pencapaian tingkat pemahaman siswa terhadap suatu materi pelajaran. MGMP Sejarah di Takalar secara aktif membantu para guru sejarah dalam pemenuhan administrasi maupun upaya peningkatan *skill* mengajar. MGMP telah cukup banyak membantu guru-guru dalam bertukar informasi, pengalaman, bahan ajar, dan lainnya yang berkaitan tugas-tugas pembelajaran.

Kata kunci: Kurikulum, guru sejarah, MGMP, Takalar, Sekolah Menengah Atas.

PENDAHULUAN

Menulis sejarah, terutama sejarah nasional, bukan sekadar kegiatan intelektual atau akademis, melainkan kegiatan bermakna politis. Hal ini dikarenakan sejarah dianggap sebagai dasar kesadaran bangsa yang fungsinya untuk memperkokoh identitas nasional (Henk Schulte Nordholt 2008). Pandangan ini mencerminkan sejarah bagian dari politik memori suatu bangsa. Dalam perspektif lebih tegas, Trouillot menyatakan bahwa permainan kekuasaan dalam menyusun narasi alternatif diawali dengan penciptaan fakta maupun sumber (Trouillot 2015). Oleh karena itu, masa lalu pada dasarnya selalu dikontestasikan, negara menjadi bagian penting di dalamnya (Hodgkin, Katharine 2014). Kepentingan negara jelas untuk membangun identitas nasional. Pertanyaan yang kemudian mengemuka, bagaimana jika politik memori itu diterapkan dalam rangka membangun identitas nasional? Di sinilah pentingnya pembelajaran sejarah nasional yang diaplikasikan dalam bentuk praktis di sekolah-sekolah. Lalu, sejauh mana kurikulum pendidikan nasional itu sendiri mampu menjadi katalisator pembelajaran sejarah di tingkat sekolah menengah atas (SMA)?

Apa itu kurikulum? Kurikulum berasal dari kata *curere*, bahasa Yunani yang berarti tempat berpacu. Menurut kamus Bahasa Indonesia, kurikulum adalah perangkat

mata pelajaran yang diajarkan pada lembaga Pendidikan (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset 2016). Pandangan lain menyebutkan bahwa kurikulum adalah isi mata pelajaran tertentu dalam program atau data dan informasi yang terekam dalam membimbing pelajar melalui buku catatan yang diperlukan dan disediakan dalam rencana pembelajaran (Julaeha, 2019:160).

Kurikulum Pendidikan memiliki sifat yang dinamis, selalu berubah, dan berkembang untuk mengikuti perkembangan dan tantangan zaman di Indonesia. Dalam sejarah pendidikan di Indonesia, perubahan dan perkembangan kurikulum telah dilakukan secara sistematis. Sejak Indonesia merdeka telah terjadi perubahan kurikulum sebanyak sembilan kali, yaitu mulai dari 1947, 1952, 1964, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, dan yang paling terakhir adalah kurikulum 2013.

Perubahan kurikulum tersebut memperlihatkan bahwa setelah era reformasi terjadi perubahan dan pengembangan kurikulum lebih cepat dibandingkan pada masa orde baru. Hal ini dikarenakan terjadinya perubahan-perubahan secara cepat dalam masyarakat sehingga paradigma kurikulum pendidikan sebelumnya dianggap tidak relevan lagi menjawab tantangan dan perubahan zaman. Kendatipun demikian, perubahan-perubahan yang cepat tentang paradigma kurikulum

itu sendiri berdampak pada kebingungan pendidik (guru) dalam menerapkan kurikulum tersebut karena terkesan “uji coba dan gagal”. “Belum matang satu model diganti dengan model pembelajaran yang baru” (Harsution 2016), seperti Kurikulum 2004 yang menekankan berbasis kompetensi, hanya berlaku dua tahun digantikan kurikulum 2006 atau kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Sebuah periode yang sangat singkat untuk mengevaluasi keberhasilan kurikulum. Pada tahun 2013, pemerintah menguji coba kembali kurikulum 2004 (Kurikulum Berbasis Kompetensi) dengan pengembangan dan penekanan yang berbeda. Sebuah paradigma kurikulum yang memfokuskan pada pemerolehan kompetensi-kompetensi tertentu oleh siswa. Tema utama kurikulum 2013 adalah menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, afektif, melalui pengamatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Untuk mewujudkan hal tersebut, dalam implementasi kurikulum, guru dituntut secara profesional merancang pembelajaran secara efektif dan bermakna, mengorganisir pembelajaran, memilih pendekatan pembelajaran yang tepat, menentukan prosedur pembelajaran, dan pembentukan kompetensi secara efektif serta menetapkan kriteria keberhasilan (Mulyasa 2002). Penerapan kurikulum ini juga tidak luput dari kritikan.

Gambaran di atas memperlihatkan kompleksitas persoalan pembelajaran sejarah di kelas yang saling kait-mengait dengan politik memori negara dalam membangun identitas nasional. Guru sejarah sebagai ujung tombaknya menghadapi dua kendala utama. Pertama, perubahan kurikulum yang cepat sehingga sebagian besar guru sejarah belum memahami dengan baik dan benar substansi yang terkandung dalam kurikulum. Namun, kurikulum itu sendiri telah diganti. Kedua, tidak terbendungnya arus informasi sejarah baik melalui buku-buku sejarah yang beredar

dalam masyarakat maupun informasi dari media massa berbeda dengan narasi resmi negara yang dituangkan dalam kurikulum pembelajaran. Penelitian ini bermaksud untuk melihat problem pendidikan yang dihadapi oleh guru sejarah dalam tingkat lebih praktis, yaitu pembelajaran di kelas, dengan kasus SMA di Takalar, Sulawesi Selatan.

Sam Wineburg dalam karyanya *Berpikir Historis: Memetakan Masa Depan, Mengajarkan Masa Lalu* mencoba memetakan empat elemen kunci dalam pembelajaran sejarah, yakni mengapa belajar sejarah, tantangan bagi siswa, tantangan bagi guru, dan sejarah sebagai memori nasional. Lebih lanjut Wineburg menilai bahwa dengan belajar sejarah, kita dapat membuat konsep mengenai kehidupan kita dalam perjalanan waktu. Aktivitas menempatkan diri dalam perjalanan waktu juga merupakan salah satu kebutuhan manusia. Gagasan yang dikemukakan oleh Wineburg ditulis di atas sebagai asumsi dasar bahwa sejarah hendak mengajarkan manusia cara membuat pilihan, mempertimbangkan berbagai pendapat, menyajikan berbagai kisah, dan meragukannya sendiri (kritis). Sejarah merupakan sarana yang tepat dalam maksud mengajarkan budi. Kemudian, siswa sebenarnya diharapkan ketika membaca sejarah, bukan hanya aspek pengetahuan kognisinya saja yang bertambah melainkan kehalusan budi pekerti, terjadi perubahan cara pandang terhadap diri, dan lingkungannya serta terbentuk pribadi yang arif lagi bijaksana. Sebenarnya kearifan itu didapatkan melalui pengalaman hidup, tetapi dengan tradisi tulis menulis, kearifan itu tersimpan dalam bentuk buku dan siapa pun yang membaca dan memahaminya akan mendapatkan kearifan tanpa perlu menjalani hidup puluhan tahun untuk menemukan arti dari kearifan (Wineburg 2006).

Pada sisi lain, guru sejarah memiliki tuntutan merubah cara pandang murid terhadap segala sesuatu. Guru mendapatkan

tuntutan yang tidak kalah besar dari murid. Gurudituntut dapat membawakan sejarah atas ilmu yang diperkenalkannya di depan kelas. Pada sekolah dasar, seorang guru biasanya membawakan beberapa mata pelajaran. Hal ini tampaknya sangat berat karena belum tentu guru harus menguasai begitu banyak sejarah dari mata pelajaran yang diampunya. Kondisi serupa jauh semakin ringan bagi guru pada sekolah menengah hingga ke perguruan tinggi karena guru membawakan materi pelajaran yang benar-benar terspesialisasi pada dirinya. Pembelajaran sejarah, pada akhirnya bermuara pada kepentingan membangun memori nasional. Namun, baik dan buruknya kejadian sejarah, haruslah dicatat agar selalu diingat, menjadi peringatan bagi generasi mendatang agar mengikutinya apabila membawa kebaikan dan menjauhinya apabila mendatangkan kerusakan.

Argumen di atas memperlihatkan bahwa praktik pembelajaran di kelas memiliki beragam dimensi yang harus diperhatikan. Berdasarkan hal tersebut, peneliti melakukan kajian bagaimana proses pembelajaran sejarah di tingkat SMA Takalar, Sulawesi Selatan. Preposisi dibangun bahwa terdapat dinamika yang saling kait-mengait antara praktik belajar di kelas dengan perubahan-perubahan kurikulum dan perubahan sosial dalam masyarakat di era reformasi. Memahami masalah yang dihadapi oleh guru dan segala dinamikanya dapat menjadi landasan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sejarah.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, pokok persoalan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimanakah trayektori pembelajaran sejarah pada tingkat sekolah menengah atas (SMA) di Takalar, Sulawesi Selatan? Pokok persoalan ini diturunkan ke dalam beberapa subpertanyaan, yakni

1. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh guru sejarah yang ditimbulkan

oleh perubahan-perubahan kurikulum 2004, 2006, dan 2013?

2. Bagaimanakah respon guru sejarah dan peran MGMP dalam menghadapi perubahan-perubahan kurikulum?

Ada beberapa buku dan tulisan yang telah dilakukan dan dijadikan rujukan bagi peneliti dalam mengkaji topik ini. Buku-buku tersebut membantu peneliti sebagai pijakan dalam menyusun proposal ini.

- Sarkawi dalam bukunya “Sejarah Sekolah Makassar: di tengah kolonialisme, pertumbuhan pers, dan pembentukan elite baru, periode 1876-1942” mengurai kehadiran pendidikan pertama di Makassar yang diupayakan oleh pemerintah Hindia Belanda pada akhir abad ke 19 serta perkembangannya hingga akhir penjajahan Jepang: pengaruh kemunculan sekolah-sekolah pertama setidaknya tampak dalam tiga hal, yakni munculnya organisasi pergerakan dan sosial keagamaan, perkembangan dunia pers, dan terjadinya mobilitas sosial yang ditandai dengan munculnya elite baru (Husain 2014).
- Buku “Sulawesi Selatan Sejarah Pendidikan” secara komprehensif mengurai sejarah pendidikan di Sulawesi Selatan, baik pendidikan modern (Barat) yang diupayakan oleh pemerintah Hindia Belanda maupun pendidikan Islam dan tradisional yang diupayakan oleh rakyat, ulama atau elite lokal. Studi ini juga melihat peranan pendidikan terhadap perubahan sosial yang pada akhirnya bermuara pada munculnya nasionalisme di Sulawesi Selatan (Sarita Pawiloy dkk 1981).
- Menurut Wahyuni dalam bukunya “Kurikulum dari Masa ke Masa: Telaah Atas Pentahapan Kurikulum Pendidikan di Indonesia”, kurikulum

adalah elemen penting dalam segala bentuk dan model pendidikan. Sejak zaman penjajah Belanda di Indonesia sudah ada kurikulum pendidikan formal yang diterapkan. Pelimpahan kurikulum di Indonesia ada dua periode, yakni periode sebelum hari kemerdekaan dan periode setelah hari kemerdekaan. Dalam perjalanan sejarah sejak kemerdekaan tahun 1945, kurikulum nasional telah berubah, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006 dan yang masih menjadi tahap penyelesaian adalah kurikulum 2013. Perubahannya adalah konsekuensi logis dari perubahan politik, sistem, sosial, budaya, ekonomi, dan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam masyarakat dan bangsa (Wahyuni 2015).

- Perubahan Kurikulum di Indonesia: Studi Kritis tentang Upaya menemukan kurikulum Pendidikan Islam yang Ideal RAUDHAH: Vol. IV, No. 1: Januari – Juni. Indonesia sering mengalami perubahan kurikulum, termasuk kurikulum pada tahun 1947, 1964, 1968, 1973, 1975, 1984, 1994, 1997, 2004, 2006, dan 2013. Pendidikan terakhir di masa mendatang perlu dirancang untuk menjawab harapan dan tantangan dari perubahan yang terjadi. Sistem pendidikan perlu dibangun terus-menerus dari pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Kurikulum pendidikan Islam harus memenuhi unsur monoteisme, agama, pengembangan potensi manusia sebagai khalifah Allah, pengembangan hubungan manusia, dan pengembangan diri kita sebagai individu serta prinsip dalam merumuskan kurikulum pendidikan Islam, prinsip keterkaitan sempurna dengan agama, termasuk

ajaran dan nilai-nilai, inklusif (universal) (Muhammedi 2016).

- The Significance of History (Predominantly as Taught in School) in Shaping the 20th - Century Individual, *Internationale Schulbuchforschung*, Vol. 3, No. 1 (1981), pp. 37-46. Masalah pengajaran sejarah di sekolah sering diangkat pada Kongres Internasional Ilmu Pengetahuan Sejarah sebelumnya. Namun, ini adalah pertama kalinya makalah khusus disajikan tentang pengajaran sejarah di sekolah sebagai sarana membentuk individu abad ke-20 (Pashuto 1981).

Tulisan ini tentu berbeda dengan tulisan yang telah ada karena tulisan ini fokus dan secara khusus membicarakan permasalahan guru sejarah menghadapi perubahan kurikulum pada sekolah menengah atas (SMA) di Takalar.

METODE

Tulisan ini menggunakan metode sejarah. Menurut Kuntowijoyo (2003), metode sejarah terdiri atas *Pertama*, Pemilihan Topik. Topik penelitian ini adalah **Pembelajaran Sejarah Tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) di Takalar, Sulawesi Selatan 2004-2018**. Secara temporal, penelitian dimulai pada tahun 2004 dengan pertimbangan bahwa pada periode ini pemerintah menerapkan kebijakan kurikulum pendidikan berbasis kompetensi. Kemudian, pada tahun 2006, kurikulum berbasis kompetensi kembali diganti dengan kurikulum 2006 atau Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Pembahasan penelitian berakhir pada 2018, dengan pertimbangan bahwa pada 2018 pemerintah memberlakukan K13 dengan penekanan dan pemfokusan yang berbeda dengan kurikulum 2004. Secara spasial, penelitian mengambil fokus SMA di Takalar, Sulawesi Selatan dengan pertimbangan bahwa salah satu unsur penting dari pembelajaran

sejarah adalah membangun memori nasional Indonesia. Takalar merupakan daerah penting dalam pembentukan identitas nasional. Pada periode revolusi (1945-49), Takalar merupakan salah satu basis perlawanan melawan kehadiran NICA di Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, peneliti berpandangan penting untuk memeriksa pembelajaran sejarah nasional di Takalar untuk melihat lebih dalam aspek penekanan memori nasional dalam pembelajaran sejarah.

Kedua, heuristik atau pengumpulan data dari berbagai sumber baik sumber lisan maupun sumber tertulis. Peneliti mengedepankan metode sejarah lisan (*oral history*) dalam pengumpulan data. Peneliti melakukan wawancara dengan guru-guru sejarah yang berada di Kabupaten Takalar. Terdapat tiga belas sekolah menengah atas dengan tiga puluh orang guru sebagai informan. Pada saat penelitian dilakukan, peneliti juga melakukan diskusi kelompok terpusat (DKT) atau *focus group discussion* (FGD) dengan menghadirkan delapan orang guru dari enam sekolah yang berbeda. Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan orang tua siswa dan siswa SMA beberapa sekolah di Kabupaten Takalar sebagai produk pembelajaran sejarah. Selain sumber lisan, peneliti juga menggunakan sumber tertulis berupa dokumen termasuk dokumen sekolah dan dokumen penilaian yang dimiliki oleh guru.

Ketiga, kritik sumber. Kritik dan verifikasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kritik terhadap sumber lisan melalui wawancara simultan. Wawancara simultan ini dapat dimanfaatkan selain untuk mendapatkan tambahan informasi atau sumber lisan juga dapat digunakan untuk kritik sumber. Kritik ekstern yang menuntut keaslian sumber, dilakukan dengan cara meminta kesaksian pelaku lain terhadap pernyataan seorang pelaku untuk memastikan apakah si pelaku benar-benar terlibat dalam peristiwa yang diceritakan. Kritik intern ditempuh dengan

membandingkan antarsumber-sumber sejarah lisan yang tersedia, sehingga diketahui versi kuat dan lemah. Kritik ekstern adalah kritik sumber untuk mengetahui keaslian sumber, sedangkan kritik intern adalah kritik untuk mengetahui apakah sumber tersebut kredibel atau dapat dipercaya (Priyadi 2014:96–98).

Keempat adalah interpretasi. Pada tahap ini, peneliti melakukan penafsiran terhadap fakta sejarah yang diperoleh dengan cara analisis. Dengan menganalisis fakta sejarah, akan ditemukan pernyataan yang saling bertautan dan pada akhirnya sampai pada langkah *kelima*, yaitu historiografi. Tahap ini adalah tahap penelitian untuk menghasilkan sebuah tulisan mengenai **Permasalahan Guru Sejarah Tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) di Takalar, Sulawesi Selatan 2004-2018**.

PEMBAHASAN

Problem: Kurikulum dan Guru

Perubahan kurikulum di Indonesia begitu dinamis, di mana setiap kurikulum yang muncul kemudian memiliki perbaikan dan perbedaan dengan kurikulum sebelumnya dalam rangka penyempurnaan. Fakta bahwa ternyata sebagian guru di Takalar yang merasakan mengajar selama 20 sampai 30 tahun mengatakan bahwa kurikulum-kurikulum tersebut tidak memiliki perbedaan signifikan antara satu dengan yang lain.

Menurut Syahrir (pengalaman 30 tahun mengajar) dan Junaedah (pengalaman 29 Tahun mengajar), mengatakan bahwa penerapan kurikulum tersebut di kelas tidak terlalu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Menurut mereka, kurikulum yang menuntut Siswa Belajar Bebas Aktif yang diterapkan mulai 1985 sama halnya dengan penerapan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang diterapkan pada 2004. Kurikulum itu menuntut siswa untuk berperan aktif dalam pembelajaran. Aktifitas pembelajaran tidak

hanya didominasi oleh guru saja tetapi subjek utama dalam proses pembelajaran adalah siswa itu sendiri (FGD, Takalar).

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006 juga demikian, tidak banyak yang berubah dari sisi tuntutan kurikulum. Siswa menjadi subjek utama dalam pembelajaran masih menjadi tuntutan utama dalam proses pembelajaran. Kemudian kurikulum 2013 (K13) diterapkan, secara konseptual K13 tidak berbeda jauh dengan KTSP.

Syahrir mengamini pernyataan “ganti menteri ganti kurikulum” bahkan guru-guru merasa dianggap sebagai kelinci percobaan dalam penerapan kurikulum. Terkadang guru merasa belum melaksanakan penerapan kurikulum sepenuhnya, lalu kemudian berganti lagi. Menurut mereka, pergantian itulah yang membuat pembelajaran tidak efektif. Terlebih lagi pada kurikulum K13, penerapannya masih belum satu semester lalu direvisi lagi. Pergantian itu juga tidak pada ranah substansial kurikulum tetapi hanya pada pemenuhan administratif.

Perbedaan paling mencolok dari KBK, KTSP, dan K13 ada pada persoalan administratif. KBK tidak begitu dirasakan tuntutan kelengkapan kebutuhan perangkat karena acuan dari perangkat itu telah disiapkan dari pusat. Guru hanya bertugas untuk menerapkan dan menyesuaikan perangkat yang telah diberikan dan menyelipkan beberapa materi terkait sejarah daerah masing-masing. KTSP lebih menuntut peran guru sepenuhnya pada pembuatan perangkat pembelajaran karena guru harus merancang sendiri perangkatnya. Apabila silabus, Standar Kompetensi (SK), Kompetensi Dasar (KD), dan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) pada KBK telah disiapkan oleh pusat, maka pada KTSP, patokan guru dari pusat hanya SK - KD saja. Silabus dan indikator pencapaian kompetensi ditentukan oleh guru.

Di antara KBK, KTSP, dan K13, K13 merupakan kurikulum yang paling

banyak tuntutan administrasinya. Guru benar-benar disibukkan dengan tuntutan administratif sehingga konten pembelajaran sering dilupakan. Meskipun guru juga butuh penyesuaian, namun dalam pelaksanaan kurikulum itu, terjadi beberapa kali revisi. Kondisi itulah yang membuat pembelajaran tidak begitu maksimal pada masa awal penerapan K13. Namun, beberapa waktu terakhir, guru sudah bisa menyesuaikan diri dengan tuntutan administrasinya. Hal ini tidak terlepas dari peran MGMP yang diaktifkan secara baik, khususnya di daerah Takalar.

Walaupun demikian, masih ada juga beberapa guru yang terkesan menyalin saja dari teman sesama guru tanpa mengerti secara baik kelengkapan administrasi tersebut. Hal itu dilakukan demi kelengkapan sebuah penilaian. Hal ini terjadi karena penguasaan IT yang tidak mumpuni. Tidak semua guru mampu dan mengerti menguasai IT terutama pada guru-guru senior sehingga terkadang mengambil jalan pintas, yakni membeli file perangkat pembelajaran atau menyalin perangkat dari guru lainnya. Kondisi tersebut dialami oleh beberapa guru di daerah Takalar. Ibu Junaeda yang telah mengajar hampir 30 tahun mengaku kesulitan menyesuaikan diri dengan tuntutan administrasi dari K13. Belum lagi tuntutan harus mengajar 24 jam dalam satu minggu. Besaran jam itu juga dirasakan cukup berat karena aktivitas guru-guru tidak hanya di sekolah saja tetapi juga urusan rumah tangga terutama ibu-ibu.

Meski demikian, guru adalah sebuah profesi dan tentu saja profesi memiliki risikonya masing-masing. Pada kasus tersebut, seluruh guru di Kabupaten Takalar mengusulkan ke pemerintah untuk memasukkan jam penyusunan perangkat pembelajaran pada tuntutan 24 jam. Dengan kata lain, guru dituntut mengajar 20 jam dan sisa 4 jam digunakan untuk menyusun perangkat pembelajaran. Jadi 24 jam tersebut, sudah termasuk tuntutan mengajar dan penyusunan

perangkat. Usulan tersebut berdasarkan pada kewajiban guru menyelesaikan empat buku kerja pada setiap tingkatan per semester. Setiap lembar kerja berisi perangkat pembelajaran, media pembelajaran, penilaian, dan daftar hadir. Rumitnya tuntutan administrasi tersebut membuat guru-guru menghabiskan waktu mereka hanya untuk pemenuhan kelengkapan berkas. Berkas yang tidak lengkap berimplikasi pada penilaian kinerja guru dan berdampak pada verifikasi pencairan dana sertifikasi yang dilakukan oleh pengawas. Selain itu, berkas yang tidak lengkap administrasi pembelajarannya membuat dana sertifikasi guru tidak dicairkan. Fenomena lain adalah pemeriksa administrasi terkadang bukan dari jurusan sejarah melainkan pemeriksa berjurusan biologi atau jurusan lain yang tidak berhubungan dengan pembelajaran sejarah. Hal itu membuat pengawas tidak mengerti dengan perangkat atau isi buku kerja.

Selain itu, program pemerintah untuk pendidikan gratis turut memberi andil terhadap pembelajaran sejarah di sekolah. Salah satu aspek praktik lapangan bagi siswa tidak dapat dilakukan dengan mudah akibat ketidaktersediaan dana. Ketersediaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) memang cukup banyak membantu sekolah dalam menyelesaikan beberapa masalah seperti membayar honorer (guru atau staf TU, administrasi (ATK dll), dan berbagai keperluan dasar atau pokok sekolah yang bersifat rutin dan reguler. Namun, praktik lapangan tidak menjadi prioritas penganggaran. Kebutuhan untuk praktik lapangan membutuhkan anggaran karena tidak dialokasikan oleh dana BOS dan hal tersebut menjadi hal negatif di mata para orang tua. Hal ini dianggap sebagai pungutan dan kepala sekolah tidak mau mengambil risiko karena yang akan menanggung akibatnya adalah kepala sekolah. Saat ini izin untuk praktik lapangan tidak cukup hanya kepala sekolah, tetapi juga harus

seizin Kepala Cabang Dinas Wilayah VII Jeneponto Takalar. Guru-guru sejarah pada akhirnya menjadi enggan melakukan praktik lapangan ini.

Pak Afdal adalah salah satu guru sejarah SMAN 6 Takalar yang pernah dipanggil dan diinterogasi oleh pihak dinas karena membawa siswa praktik lapangan dengan memungut biaya. Akhirnya, dalam proses itu pak Afdal dan pemerintah provinsi mencapai kesepakatan, yakni laporan siswa di lapangan harus diserahkan ke Kantor Dinas Provinsi Sulawesi Selatan. berpedoman dengan kasus tersebut membuat guru-guru lain akhirnya enggan untuk membawa siswa ke tempat-tempat bersejarah. Proses administrasi yang rumit dan berisiko tersebut menjadi penyebab utama dari keengganan itu sendiri. Namun disisi lain, pembelajaran mata pelajaran sejarah harus berkunjung ke lapangan agar imajinasi siswa dapat terealisasi dan siswa mendapatkan banyak informasi tentang sejarah yang mereka pelajari.

Siswa pada akhirnya dapat bersentuhan dengan peristiwa yang mereka pelajari dan hal ini efektif dalam penanaman memori siswa terhadap pembelajaran sejarah. Mata pelajaran sejarah juga tidak akan menjadi mata pelajaran yang membosankan. Kuntowijoyo mengklasifikasi pembelajaran sejarah dengan menggolongkan sejarah sebagai ilmu yang memiliki sifat rekreatif. Bentuk pembelajaran sejarah tidak hanya mendengarkan guru berceramah tetapi siswa juga bersentuhan langsung dengan objek kajian mereka. Dengan kata lain, materi yang disampaikan oleh guru terealisasi dengan berkunjung ke situs-situs sejarah.

Karakter kurikulum 2013 yang menuntut peran guru secara penuh dalam penyusunan perangkat pembelajaran membawa dampak positif pada tataran konten materi pembelajaran. Berbeda halnya dengan KBK dan KTSP yang konten materinya

diarahkan dari pusat. Ibu Hasnah sebagai ketua MGMP Sejarah Kabupaten Takalar selalu menekankan kepada guru-guru sejarah untuk menyelipkan materi sejarah lokal dalam setiap materi pembelajaran. Contohnya pada materi sejarah Indonesia masa revolusi dan perjuangan Ranggong Daeng Romo selalu diselipkan. Ibu Hawani juga demikian, beliau selalu menyelipkan materi-materi tentang perjuangan Rakyat Takalar dalam mempertahankan kemerdekaan di mana pada masa periode tersebut, Takalar merupakan pusat perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan. Kelaskaran yang paling terkenal, yakni Laskar Lipan Bajeng.

Guru-guru di Takalar pada umumnya menyelipkan materi sejarah lokal, Pak Syahrir dan Afdal pun demikian. Salah satu materi yang sering diselip adalah materi tentang perang Makassar dan materi yang berhubungan dengan perjuangan Indonesia dalam menantang penjajahan pemerintah kolonial Belanda. Tujuan dari penyelipan materi sejarah lokal ini adalah agar siswa mengetahui sejarah daerahnya sendiri, agar identitas mereka tampak, dan mereka dapat mengetahui perjuangan leluhur mereka. Perbedaan itulah yang cukup mencolok pada KBK, KTSP, dan K13. KBK dan KTSP lebih kaku dengan persoalan materi karena garis silabus telah ditentukan dari pusat. Oleh karena itu, materi dikontrol penuh oleh pemerintah pusat. Terkadang materi sejarah lokal terabaikan, namun guru-guru tidak disibukkan oleh pemenuhan administrasi yang ribet. K13 dapat dikatakan kebalikan dari KBK dan KTSP karena materi ditentukan sepenuhnya oleh guru. Di sisi lain guru juga disibukkan dengan pemenuhan administrasi. Selain itu, jumlah jam pengajaran sejarah lebih banyak pada K13. Kelas peminatan diberikan kuota jam pelajaran, yakni 5 (lima) jam pelajaran dalam satu minggu dengan rincian 3 (tiga) jam untuk mata pelajaran sejarah peminatan dan 2 (dua) jam sejarah wajib. Sedangkan kelas

nonpeminatan diberikan 2 (dua) jam pelajaran untuk sejarah wajib.

Kondisi tersebut memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap pembelajaran sejarah di kelas. Guru dapat dengan leluasa menggunakan metode dan media pembelajaran. Materi yang disampaikan juga dapat selesai dengan maksimal karena waktu yang memadai. Berbeda dengan KBK dan KTSP, jam sejarah hanya tiga jam untuk kelas peminatan IPS dan satu jam untuk nonpeminatan IPS (Kelas X, XI IPA, XII IPA). Media pembelajaran dapat digunakan dengan maksimal, contohnya guru dapat dengan leluasa menampilkan video atau film sejarah. Media audio visual tersebut merupakan media efektif dengan melihat kondisi siswa saat ini yang lebih tertarik dengan pembelajaran yang menggunakan media elektronik.

Selain itu, di sekolah Pak Afdal mengajar dengan sebuah aplikasi yang dapat diakses dengan bebas oleh siswa. *Quipper school* merupakan nama aplikasi tersebut. *Quipper school* menyediakan materi dan gambaran umum dari perangkat pembelajaran sehingga siswa dapat mengakses seluruh informasi terkait dengan materi pembelajaran yang akan diajarkan. Selain itu, guru juga tidak perlu bersusah payah untuk menjelaskan gambaran umum materi yang akan disampaikan. Proses elaborasi juga dapat berjalan dengan baik.

Masalah umum yang dihadapi oleh guru dalam proses pembelajaran, yakni materi tentang manusia purba dan materi periode 1965 khususnya G 30 S. Pak Syahrir sebagai guru paling tua merasakan perubahan materi tentang materi tersebut. Narasi yang paling mencolok adalah penggunaan G30 S/PKI dan G30 S. Pak Syahrir melewati periode perubahan itu terutama ketika pergantian Presiden Soeharto pada 1998. Praktis materi sejarah tidak sekaku pada masa orde baru. Pak Syahrir juga bebas memberikan berbagai versi tentang peristiwa tersebut. Guru-guru

lainnya juga mendapati pertanyaan dari siswa yang terkait dengan peristiwa 65 tersebut. Pertanyaan paling umum, yakni siapa dalang dari peristiwa itu?

Ibu Hawani menganjurkan untuk tetap memaparkan berbagai versi dari peristiwa itu sendiri lalu memberikan pertimbangan kepada siswa untuk memilih versi mana yang mereka anggap benar. Pemilihan versi itu sendiri tentu saja harus berdasarkan pada sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Tugas guru menyampaikan berbagai versi lalu siswa diajak untuk berfikir lebih jauh. Tujuannya adalah untuk merangsang siswa untuk mencari informasi itu lebih jauh. Pengalaman lain yang dirasakan oleh Ibu Hawani adalah ketika ditanya apakah kita berasal dari kera? Beliau kemudian memberikan jawaban dua versi dengan penjelasan bahwa insan pertama adalah Nabi Adam, sedangkan manusia pertama berasal dari kera. Hal itu dapat menjadi rujukan siswa yang dilihat dari sudut pandang agama dan sains. Guru-guru lain juga melakukan hal yang sama, yakni memberikan dua atau lebih versi yang berbeda lalu mengajak siswa untuk berfikir.

Kurikulum KBK dan KTSP masih memberikan materi pembelajaran dari pemerintah pusat. Adanya penyeragaman itu membuat narasi lokal tertutup. Tidak dipungkiri bersama bahwa yang dimaksud dengan narasi nasional itu sendiri kebanyakan bercerita tentang “Sejarah Jawa” hanya sedikit menyentil sejarah di daerah masing-masing. Dengan kata lain, porsi narasi sejarahnya tidak berimbang. Berbeda dengan pada penerapan K13, adanya kebebasan penuh guru untuk menyusun perangkat pembelajaran memberikan dampak positif. Guru-guru dapat dengan leluasa memasukkan materi sejarah lokal dalam pembelajaran sejarah.

Kebebasan yang diberikan kepada guru tidak serta-merta menemui kendala. Guru dihadapkan pada penguasaan materi. Guru-guru dari jurusan sejarah tidak akan kesulitan tetapi guru-guru yang bukan dari jurusan sejarah akan sedikit kesulitan terutama ketika berhadapan dengan materi sejarah yang masih dalam perdebatan. Salah satu contoh adalah guru dari SMA 1 Takalar. Guru tersebut tidak memiliki *background* sejarah sehingga beliau kesulitan dalam mengajar tetapi karena telah mengajar belasan tahun dan materi sejarah juga tidak banyak berubah, beliau akhirnya dapat mengatasi masalah tersebut. Bahkan, Ibu Sabariah dari SMAN 7 Takalar merasa sejarah itu mudah karena telah ia ajarkan selama 15 tahun.

Pengalaman memang menjadi guru terbaik bagi guru-guru dalam mengajar. Terlebih materi sejarah tidak banyak berubah karena sifat materi sejarah yang faktual. Meskipun beberapa materi mengalami revisi narasi terutama setelah rezim orde baru runtuh. Seiring dengan perubahan kurikulum, perubahan materi juga bertitik tolak pada pergantian rezim orde baru. Pada masa orde baru, materi sejarah sangat dibatasi bahkan direkonstruksi ulang dan disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah saat itu. Namun setelah pergantian rezim, penelitian sejarah menjadi lebih terbuka dan dapat diakses dimana saja.

Penerapan Kurikulum

Pengalaman guru sejarah di Takalar tidak hanya sebatas pada kurikulum tetapi juga kondisi siswa. Kebanyakan siswa yang bersekolah di sekolah unggulan lebih mudah dikontrol dibandingkan sekolah lain. Contoh di SMA PGRI Takalar, berdasarkan pengalaman Pak Mualah, siswa sangat bandel dan sering melakukan kekerasan kepada guru dan pegawai sekolah. Keterlibatan orang tua juga sangat jauh karena mencampuri urusan

anak mereka di sekolah. Tidak jarang terjadi pemukulan ataupun penghakiman sendiri.

Kebijakan zonasi pemerintah kemudian perlahan menghapus kondisi tersebut. Dampak positif dari zonasi adalah meratanya persebaran siswa. Jadi, kuantitas dan kualitas siswa juga tersebar merata. Tidak ada lagi status unggulan dan tidak diunggulkan. Hanya sekolah harus siap menyediakan fasilitas yang sama pula dengan sekolah lainnya. Hal itu menjadi dampak negatif karena siswa yang potensial tidak mendapatkan fasilitas yang mendukung mereka. Kondisi itu tentu saja menjadi pekerjaan rumah (PR) besar pemerintah provinsi untuk menyediakan fasilitas yang memadai.

Selain itu, sekolah yang awalnya unggulan memperoleh imbas dari siswa yang susah diatur. Hal itu tentu saja tergantung juga pengelolaan sekolahnya masing-masing. Apabila sekolah serius menangani dan membimbing siswa yang sulit diatur, maka sekolah akan menghasilkan generasi penerus yang berkualitas. Contoh SMAN 1 Kabupaten Takalar yang sebelum penerapan zonasi, mereka rutin menerima siswa-siswa berprestasi. Namun, sejak sistem zonasi diterapkan, mau tidak mau SMAN 1 menerima siswa dari berbagai kalangan yang menyebabkan perubahan cara guru-guru dalam menghadapi siswa-siswa dengan tingkat pengetahuan dan *background* yang berbeda-beda.

Secara konseptual perubahan kurikulum seharusnya tidak berdampak pada kesiapan siswa dalam menerima pembelajaran yang ada, tetapi kebiasaan belajar menuntut siswa harus beradaptasi dengan konsep pembelajaran yang baru. Gaya penerapan tuntutan yang lebih berat dalam hal pemenuhan pencatatan administrasi belajar oleh guru. Waktu belajar siswa terkadang tersita banyak dalam proses pemenuhan administrasi tersebut sehingga cenderung mengabaikan konten pembelajaran yang harusnya dapat dieksplorasi lebih jauh

dalam bentuk diskusi yang lebih panjang atau dalam bentuk kunjungan belajar yang dibutuhkan untuk melihat secara langsung salah satu objek sejarah yang terkait dengan tema pembelajaran.

Peranan MGMP Sejarah dalam Menghadapi Perubahan Kurikulum di Kabupaten Takalar

Peranan MGMP sejarah SMA Kabupaten Takalar dalam kurun waktu 2004 sampai dengan 2018 akan dijelaskan berdasarkan perkembangan organisasi MGMP itu sendiri, sehingga pemaparan berikut ini akan terbagi dalam beberapa periode waktu sebagai berikut:

A. Kurun Waktu dari Tahun 2004 s.d. 2006

Tahun 2004 s.d.2006, MGMP Sejarah SMA Kabupaten Takalar belumlah terbentuk. Yang ada hanya MGMP IPS SMA Kabupaten Takalar yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Takalar. MGMP ini meliputi seluruh guru mata pelajaran rumpun IPS (Sejarah, Geografi, Ekonomi, Sosiologi) yang ada di Kabupaten Takalar. Kegiatannya tentu saja dikoordinasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Takalar yang sifatnya temporer dan tidak secara berkala. Kegiatan pada umumnya adalah penyusunan perangkat pembelajaran yang biasanya dilaksanakan di awal tahun pelajaran. Pertemuan sangat minim, bahkan dalam tahun pelajaran 2005/2006, MGMP IPS ini tidak lagi memiliki kegiatan.

Tidak adanya kegiatan rutin MGMP dalam kurun waktu 2004 s.d. 2006, tidak berarti bahwa guru-guru sejarah SMA Kabupaten Takalar tertinggal materi atau hal-hal yang berkaitan dengan perubahan kurikulum karena secara kebetulan saat itu salah seorang guru sejarah di SMA Negeri 3 Takalar (Hasnawati T., S.Pd.) lolos seleksi tes yang diadakan oleh Pusat Pengembangan

dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK) Pendidikan Kewarganegaraan dan IPS Malang dan terpenggil mengikuti Diklat Guru Mata Pelajaran Sejarah Tingkat SMA di Malang, mulai Jenjang Dasar (2004), Jenjang Lanjut (2006), dan Jenjang Menengah (2007). Setiap selesai mengikuti diklat dalam setiap jenjang, peserta diklat wajib melakukan kegiatan pengimbasan ke rekan-rekan guru sejarah di kabupaten masing-masing dan laporan pelaksanaan kegiatan pengimbasan dikirim ke PPPG IPS dan PMP Malang (sekarang P4TK

PKn dan IPS Malang). Meskipun kegiatan pengimbasan ini terkendala ketiadaan dana, namun kegiatan pengimbasan ke guru-guru Sejarah ini setidaknya telah memberi ruang bagi guru-guru sejarah SMA Kabupaten Takalar untuk menerima informasi dan materi berkaitan dengan perubahan dan perkembangan kurikulum yang ada. Tabel berikut ini diambil dari laporan pengimbasan yang dilakukan oleh Ibu Hasnawati dalam kurun waktu 2004 s.d. 2006 untuk menggambarkan kegiatan yang telah dilakukan.

Jadwal Kegiatan Pelaksanaan Imbas (Tahun 2004)

NO	TGL PELAKSANAAN	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
1.	6 September 2004	Mengadakan sosialisasi tentang kurikulum 2004	Dilaksanakan di SMAN 3 Takalar
2.	22 September 2004	Menginformasikan dan mengkomunikasikan pengembangan silabus dan penilaian, sumber dan media pembelajaran serta skenario Pembelajaran	
3.	5 Oktober 2004	Secara bersama merancang pengembangan silabus dan sistem penilaian	
4.	20 Oktober 2004	Membuat media pembelajaran	
5.	3 November 2004	Mendiskusikan sumber pembelajaran	
6.	16 November 2004	Menyusun skenario pembelajaran	
7.	4 Desember 2004	Mendiskusikan materi-materi dalam kurikulum	
8.	15 Desember 2004	Merampungkan kegiatan dan mengevaluasi	

Keberadaan pengimbasan di atas sangat membantu guru-guru sejarah SMA di Takalar dalam memahami perubahan kurikulum 1994 ke kurikulum 2004 (atau yang dikenal pula dengan istilah Kurikulum Berbasis Kompetensi /KBK). Perubahan kurikulum 2004 sangat terasa bagi guru-guru, terutama dalam hal penyusunan perangkat pembelajaran dan penilaiannya. Kurikulum 2004 memperkenalkan istilah Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD). Istilah pencapaian kompetensi menggantikan istilah tujuan pembelajaran yang ada pada kurikulum sebelumnya. Kurikulum 2004

juga mengenalkan istilah Standar Ketuntasan Belajar Minimal (SKBM) atau Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang belum ada di kurikulum sebelumnya. Dengan demikian, kegiatan pengimbasan sangat membantu guru-guru dalam memahami perkembangan kurikulum baru tahun 2004.

Dalam tahun 2005 s.d. 2006, guru-guru sejarah SMA Kabupaten Takalar (bersama guru-guru mata pelajaran lainnya) juga menerima materi berkaitan perubahan kurikulum melalui kegiatan pelatihan atau *workshop* yang sering diadakan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten

Takalar, dan sebagai alumni Diklat dari P4TK PKn dan IPS Malang, Ibu Hasna dipercaya menjadi salah satu fasilitator dalam setiap kegiatan pelatihan tersebut. Tabel- tabel berikut memperlihatkan materi yang disajikan dalam kegiatan pelatihan :

NO	MATERI
1.	Kebijakan Peningkatan Mutu Pendidikan di Sulawesi Selatan
2.	Profesionalisme Guru
3.	Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)
4.	Muatan Lokal
5.	Pengembangan Diri
6.	Penetapan Standar Ketuntasan Belajar Minimal (SKBM/Kriteria Ketuntasan Minimal
7.	(KKM)
8.	Pengembangan Silabus
9.	Pengembangan Bahan Ajar
10.	Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
11.	Teknik Penyiapan Perangkat Penilaian

NO	MATERI
1.	Kebijakan Peningkatan Mutu Pendidikan di Kabupaten Takalar
2.	Konsep Dasar KBK dan Pengembangan KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan)
3.	Analisis dan Identifikasi Standar Kompetensi Lulusan (SKL) (Permen No.23 Tahun 2006)
4.	Teknik dan Praktik Penetapan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) dan Analisisnya
5.	Teknik dan Praktik Pengembangan Silabus dan RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran)
6.	Pemilihan dan Pengembangan Bahan Ajar
7.	Teknik Penyiapan Perangkat Penilaian dan Laporan Hasil Belajar Siswa
8.	Pengembangan Pembelajaran Luar Kelas/Karyawanisata

Dengan demikian, sosialisasi tentang perubahan kurikulum pada tahun 2006 (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), didapatkan oleh guru-guru sejarah SMA Kabupaten Takalar melalui pelatihan-pelatihan yang rutin diadakan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Takalar yang pelaksanaannya ditempatkan di Kota Makassar.

B. Kurun Waktu Tahun 2007 s.d. 2010

Sejak Maret 2007, MGMP Sejarah SMA Kabupaten Takalar telah terbentuk dengan susunan pengurus sebagai berikut:

- Ketua: Hasnawati T.,S.Pd (SMA Negeri 3 Taalar
- Sekretaris: Abd. Gaffar, S.Pd (SMA Negeri 1 Galesong Utara)
- Bendahara: Dra Junaeda A. (SMA Negeri 2 Takalar)

Dalam kurun waktu ini, MGMP Sejarah SMA Kabupaten Takalar rutin mengadakan pertemuan dua kali dalam sebulan. Kegiatan rutin tersebut sangat membantu guru-guru sejarah dalam menghadapi perubahan kurikulum, apalagi tidak semua guru berkesempatan mengikuti pelatihan atau *workshop* yang diadakan oleh dinas kabupaten atau provinsi. Tabel berikut memperlihatkan kegiatan MGMP Sejarah

Takalar dalam kurun waktu ini.

NO	PERTEMUAN	KEGIATAN	TEMPAT
1.	I	- Pembukaan - Kebijakan Pemerintah dalam bidang Pendidikan	SMAN 3 Takalar
2.	II	- Penentuan KKM - Pengembangan Silabus dan pendalaman materi	SMAN 3 Takalar
3.	III	- Program Tahunan dan Program Semester - Penyusunan RPP	SMAN 3 Takalar
4.	IV	- Pengembangan Sistem Penilaian - Penyusunan soal untuk Bank Soal	SMAN 3 Takalar
5.	V	- Analisis ketuntasan siswa - Pengembangan sumber dan Media Pembelajaran	SMAN 3 Takalar
6	VI	- Pengembangan Metode Pembelajaran - Pembuatan Modul (Diktat) dan LKS	SMAN 3 Takalar
7	VII	- Pembelajaran Luar Kelas - Penelitian Karya Tulis Ilmiah dan Peneltian Tindakan Kelas (PTK)	SMAN 3 Takalar
8	VIII	- Pengembangan Profesi dan Karier Guru - Evaluasi Kegiatan dan Penutupan	SMAN 3 Takalar

Peserta (Angota) MGMP Sejarah Kabupaten Takalar meliputi semua guru sejarah SMA dan MA, atau guru mata pelajaran lain yang mendapat tugas mengajar

sejarah pada sekolah SMA dan MA dalam wilayah Kabupaten Takalar. Keanggotaan MGMP dalam kurun waktu itu adalah sebagai berikut:

NO	NAMA / NIP/NIGB	UNIT KERJA
1	HASNAWATI T., S.Pd	SMAN 3 Takalar
2	ABD. GAFFAR, S.Pd, M.Pd	SMAN 1 Galesong Utara
3	Dra. JUNEDA A.	SMAN 2 Takalar
4	Drs. SYAHRIR MAPPATAKKA	SMAN 1 Takalar
5	ASPIANI ALAM, S.Pd	SMAN 1 Takalar
6	HAWANI, S.Pd	SMAN 2 Takalar
7	FATMAWATI INDAR, S.Pd 580046198	SMAN 2 Takalar
8	MAJAMUDDIN, S.Pd	SMAN 3 Takalar
9	HASMAWATI, S.Pd	SMAN 3 Takalar
10	ST. KURSIH, S.Pd	SMAN 3 Takalar
11	A. SURIANTO, S.Pd	SMAN 1 Marbo
12	MUH. AFDAL, SS, S.Pd	SMAN 1 Polut
13	LAERNAWATI, S.Pd	SMAN 1 Polut
14	LA LILAWADO, S.Pd	SMAN 1 Polut
15	HUSEN, S.Ag	SMAN 2 Polut
16	DAMAYANTI, S.Pd	SMAN 2 Polut
17	DRS. AKBAR AR.	SMA Ranggong
18	MUALLAH, S.Pd	SMA PGRI

19	NURINNA, S.PD	SMA Al Qamar Bajeng
20	ABD. MAJID, S.PD	SMA Pesantren Tarbiyah
21	BAIRONI Z., S.Pd	MA Salaka

Meski terkendala dana karena tidak adanya dana tetap, namun antusiasme guru-guru dalam berkegiatan di MGMP ini cukup besar. Meski dalam setiap pertemuan tidak semua anggota MGMP dapat hadir, tetapi keberadaan MGMP telah cukup banyak membantu guru-guru dalam bertukar informasi, pengalaman, bahan ajar, dan lainnya yang berkaitan tugas-tugas pembelajaran.

C. Kurun Waktu Tahun 2011 s.d. 2012

Akhir tahun 2011, MGMP Sejarah, SMA Kabupaten Takalar bersama tujuh MGMP

mata pelajaran lainnya di Takalar, mendapat bantuan dana *block grant* dari Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional, melalui Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Sulawesi Selatan. Dana bantuan ini adalah untuk kegiatan pelatihan tentang Penilaian Kinerja Guru (PKG) bagi guru-guru di Takalar. Dengan dana bantuan inilah MGMP Sejarah SMA Kabupaten Takalar mengadakan Pelatihan PKG selama tiga hari (34 JP) pada tanggal 12 s.d. 14 Januari 2012, dilaksanakan di SMA Negeri 3 Takalar. Materi yang disajikan dalam kegiatan ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

NO	Hari/Tanggal, Waktu	Materi	Narasumber
Kamis 12 Januari 2012			
		Hari ke 1	
	07.30 – 08.00	Pembukaan	Panitia
	08.00 – 10.00	Kebijakan tentang Pengembangan Profesi Guru	Pejabat Dinas
	10.00 – 11.30	Pendidikan Karakter Bangsa	Fasilitator Daerah
	11.30 – 12.30	Overview PK Guru dan PKB	Fasilitator Daerah
	12.30 – 13.00	ISHOMA	Panitia
	13.30 – 14.45	(lanjutan) Overview PK Guru dan PKB	Fasilitator propinsi
	14.45 – 16.00	Kegiatan 1. Game overview PK Guru	Fasilitator Daerah
	16.00 – 17.30	Kegiatan 2. Game overview PKB	Fasilitator propinsi
Jumat 13 Januari 2012			
		Hari ke 2	
	07.30 – 09.00	Kegiatan 3. Pemahaman Konsep PKB	Fasilitator Daerah
	09.00 – 10.00	Kegiatan 4: Pemahaman terhadap Proses PK Guru dan Instrumen Pendukungnya	Fasilitator propinsi
	10.00 – 11.30	Kegiatan 5: Pengamatan dan Pendeskripsian Aktifitas Guru dan siswa	Fasilitator Daerah
	11.30 – 13.30	ISHOMA	Panitia
	13.30 – 14.45	Kegiatan 6: Penggunaan Indikator Kinerja Guru dan Penilaian Kompetensi (<i>pengamatan</i>)	Fasilitator propinsi
	14.45 – 16.15	Kegiatan 7: Penggunaan Indikator Kinerja Guru dan Penilaian Kompetensi (<i>pengamatan dan pemantauan</i>)	Fasilitator propinsi

16.15 – 17.30	Kegiatan 8: Penggunaan Indikator Kinerja Guru dan Penilaian Kompetensi	(evaluasi 2)
Sabtu	Hari ke 3	
14 Januari 2012		
07.30 – 09.00	Kegiatan 9: Analisis Hasil PK Guru	Fasilitator propinsi
09.00 – 10.30	Kegiatan 10: Identifikasi Kompetensi	Fasilitator propinsi
10.30 – 12.30	Kegiatan 11: Perencanaan PKB	(evaluasi 3)
12.30 – 13.30	ISHOMA	Panitia
13.30 - 15.00	Kegiatan 12: Perencanaan PKB (lanjutan)	Fasilitator daerah
15.00 – 16.00	Ujian akhir	Panitia
16.00 – 17.00	Penutup	Pejabat Dinas
17.00 – 17.30	Penyelesaian Administrasi	Panitia

Adanya kegiatan pelatihan di MGMP Sejarah SMA Kabupaten Takalar tersebut telah membantu guru-guru sejarah SMA di Kabupaten Takalar dalam memahami pengertian dan prosedur dalam Penilaian Kinerja Guru (PKG) dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB). Setelah tidak ada lagi dana bantuan, MGMP Sejarah Takalar tetap mengadakan pertemuan rutin sesuai rencana program yang telah disusun dengan menggunakan dana swadaya anggota atau dana pribadi Ketua MGMP. Meskipun anggota yang hadir tidak tetap, terkadang banyak dan terkadang sedikit, namun yang pasti MGMP Sejarah Takalar tetap eksis.

D. Kurun Waktu Tahun 2013 s.d. 2015

Dalam kurun waktu ini, terjadi perubahan yang cukup mendasar pada kurikulum Indonesia. Tanggal 5 Juni 2013, keluar Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0128/MPK/KR/2013 tentang Implementasi Kurikulum 2013 yang menetapkan bahwa kurikulum 2013 diimplementasikan secara bertahap dan terbatas mulai tahun pelajaran 2013/2014 yang dimulai dari kelas X di 1.270 SMA sasaran dan sejumlah SMA yang melaksanakan secara mandiri.

Di Kabupaten Takalar, terdapat dua sekolah yang menjadi sekolah rintisan untuk pelaksanaan terbatas kurikulum 2013 pada tahun pelajaran 2013/2014, yaitu SMA

Negeri 1 Takalar dan SMA Negeri 3 Takalar. Dengan demikian, guru-guru dari dua sekolah inilah yang menerima atau mendapat panggilan pelatihan-pelatihan yang diadakan di Makassar atau yang diadakan di Jakarta. Selain melalui pelatihan, sosialisasi tentang penerapan kurikulum 2013 (K 13) juga dilakukan melalui MGMP, termasuk MGMP Sejarah Takalar. Guru SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 3 Takalar menjadi sumber informasi dan saling berbagi pengalaman.

Tahun Pelajaran 2014/2015, berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 156928/MPK.A/KR/2013 Tanggal 8 November 2013 tentang Implementasi Pelaksanaan Kurikulum 2013 yang diperluas di seluruh SMA pada kelas X dan XI. Dengan demikian, pada tahun pelajaran 2014/2015 seluruh SMA di Kabupaten Takalar telah menerapkan kurikulum 2013 pada Kelas X dan Kelas XI.

Penerapan kurikulum 2013 di semua sekolah pada tahun pelajaran 2014/2015 membuat kementerian pendidikan banyak melakukan pelatihan atau *workshop* secara berjenjang supaya implementasi kurikulum 2013 lebih dapat disosialisasikan secara merata. Secara kebetulan, Ketua MGMP Sejarah SMA Takalar, Ibu Hasnawati terpanggil mengikuti pelatihan Instruktur Nasional untuk K 13 dalam kurun waktu 2014 – 2015. Kesibukan sebagai instruktur dalam setiap pelatihan

membuat kegiatan MGMP Sejarah di Takalar agak tersendat karena anggota MGMP hanya mau berkegiatan jika ketuanya hadir.

Pertemuan 2014, setelah pemerintah melakukan evaluasi dan masukan dari berbagai kalangan pelaksana di sekolah, ditemukan beberapa kendala di antaranya kesiapan guru, ketersediaan buku, dan belum lengkapnya konsep kurikulum 2013. Mempertimbangkan pentingnya kurikulum 2013 dan masih ditemukannya beberapa kendala teknis tersebut sehingga Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013, melakukan penataan kembali implementasi kurikulum 2013 pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah termasuk SMA mulai semester dua tahun pelajaran 2014/2015. Artinya, sekolah yang baru satu semester menggunakan kurikulum 2013, pada semester dua tahun pelajaran 2014/2015, kembali menggunakan kurikulum tahun 2006 sampai ada ketetapan dari kementerian untuk melaksanakan kurikulum 2013. Sedangkan satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang telah melaksanakan kurikulum 2013 selama tiga

semester tetap menggunakan kurikulum 2013 dan merupakan satuan pendidikan rintisan penerapan kurikulum 2013. Berdasarkan keputusan tersebut, sekolah di Takalar yang sebelumnya telah menggunakan K13, kembali lagi menggunakan kurikulum 2006 (KTSP), kecuali SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 3 Takalar tetap menggunakan kurikulum 2013.

Tahun 2015 pemerintah melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan mengadakan Uji Kompetensi Guru (UKG) bagi seluruh guru PNS dan guru honorer (yang memiliki NUPTK). Kompetensi yang diuji adalah kompetensi profesional dan pedagogik yang dilakukan secara daring serentak di seluruh Indonesia. Pemerintah memasang nilai minimal dalam UKG 2015 ini adalah 55,00. Anggota MGMP Sejarah Takalar meski tidak semuanya mencapai nilai minimal yang ditargetkan pemerintah, tetapi setidaknya dari 21 orang peserta MGMP Sejarah Takalar yang mengikuti UKG ini, 75 % di antara mereka telah mencapai nilai minimal yang ditargetkan. Bahkan, Ketua MGMP Sejarah Takalar memperoleh nilai yang termasuk tertinggi kedua dalam perolehan Nilai UKG Mata Pelajaran Sejarah di Sulawesi Selatan.

Tabel Perolehan Nilai UKG Anggota MGMP Sejarah SMA Kabupaten Takalar

NO	MATA PELAJARAN	NO.UKG	NAMA PESERTA	NILAI AKHIR
1	Sejarah Indonesia	201510648692	HASNAWATI T.	95
2	Sejarah Indonesia	201510852833	SUDIRMAN	82,1429
3	Sejarah Indonesia	201510652016	HAWANI	76,1905
4	Sejarah Indonesia	201510687465	FATMAWATI INDAR	71,4286
5	Sejarah Indonesia	201512216758	AKBAR AR	70,2381
6	Sejarah Indonesia	201510313452	ASPIANI ALAM	70,2381
7	Sejarah Indonesia	201510314093	MUALLAH	67,8571
8	Sejarah Indonesia	201512480422	HJ NURHAYATI	61,9048
9	Sejarah Indonesia	201512465783	HUSEN	61,9048
10	Sejarah Indonesia	201512484877	FERAWATI	60,7143
11	Sejarah Indonesia	201510062856	MARLIANA	59,5238
12	Sejarah Indonesia	201510093570	SABARIAH	59,5238
13	Sejarah Indonesia	201502802572	SAFRI	58,3333

14	Sejarah Indonesia	201511927253	SYAHRIR MAPPATAKKA	57,1429
15	Sejarah Indonesia	201510439968	MUHAMMAD AFDAL	55,9524
16	Sejarah Indonesia	201507019622	ISMAIL	54,7619
17	Sejarah Indonesia	201503176465	NUR SANI	54,7619
18	Sejarah Indonesia	201506662512	HAERANI	45,2381
19	Sejarah Indonesia	201510202796	JUNAEDA A.	45,2381
20	Sejarah Indonesia	201510857395	MAJAMUDDIN	42,8571
21	Sejarah Indonesia	201500902714	IDHAYANI	40,4762

E. Kurun Waktu Tahun 2016 s.d. 2019

Tanggal 20 Februari 2016, MGMP Sejarah SMA Kabupaten Takalar membentuk kepengurusan yang baru untuk periode 2016-2018. Susunan Pengurus inti yang terbentuk adalah:

Ketua : Hasnawati T., S.Pd (SMA Negeri 3 Takalar)
 Sekretaris : Muh. Afdal, S.S, S.Pd (SMA Negeri 1 Polombangkeng Utara)
 Bendahara : Majamuddin, S.Pd (SMA Negeri 3 Takalar)

MGMP Sejarah SMA Kabupaten Takalar mencoba mengirim proposal untuk mendapatkan Dana Bantuan Langsung dari Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional, dan ternyata proposal MGMP Sejarah dan

MGMP Kimia SMA Kabupaten Takalar lolos bersama delapan MGMP mata pelajaran lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan. MGMP Sejarah SMA Takalar menjadi satu-satunya MGMP Sejarah di Sulawesi Selatan yang lolos mendapatkan bantuan dana.

Dana Bantuan Langsung (*Blok Grant*) yang diterima MGMP Sejarah Takalar pada tahun 2016, digunakan untuk mengadakan kegiatan peningkatan kompetensi dan karir guru melalui kegiatan guru pembelajar di MGMP Sejarah SMA Kabupaten Takalar. Kegiatan ini dilaksanakan dua tahap. Tahap pertama diselenggarakan pada tanggal 25 September s.d. 6 Oktober, sedangkan tahap kedua dilaksanakan pada tanggal 8 s.d. 28 Oktober 2016, bertempat di SMA Negeri 3 Takalar.

Materi yang disajikan dalam kegiatan ini dapat dilihat dalam struktur program berikut ini:

KETERANGAN	MATERI	ALOKASI WAKTU
Tatap Muka Tahap 1 (4 kali pertemuan)	1. Kebijakan Program Guru Pembelajar	2 Jam
	2. Kajian Modul sesuai Kelompok Kompetensi Pedagogis	4 Jam
	3. Diskusi kelompok terpimpin tentang modul - modul Kompetensi Profesional Guru Pembelajar	4 Jam
	4. Pemantapan Penilaian Kinerja Guru	12 Jam
	5. Pengembangan Diri, Publikasi Ilmiah dan Karya Ilmiah	16 Jam
Jumlah Jam Tatap Muka Tahap 1		38 Jam
Tatap Muka Tahap 2 (7 kali pertemuan)	1. Kajian Modul sesuai Kelompok Kompetensi Pedagogis	14 Jam
	2. Diskusi kelompok terpimpin tentang modul-modul Kompetensi Profesional Guru Pembelajar	14 Jam
	4. Presentasi Hasil Kerja Peserta	6 Jam
	5. Rencana Tindak Lanjut kegiatan Tatap Muka di MG-MP untuk pengerjaan modul Guru Pembelajar	10 Jam
Jumlah Jam Tatap Muka Tahap 2		44 Jam
TOTAL JUMLAH JAM		82 Jam

Tahun 2017, secara resmi pendidikan menengah (SMA dan sederajat) dialihkan pengelolaannya oleh provinsi. Dengan demikian, sejak tahun 2017, MGMP dibawah langsung oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Tahun 2017 ini pula, MGMP Sejarah SMA Kabupaten Takalar kembali mendapat dana bantuan dari Kementerian Pendidikan. Kali ini MGMP Sejarah Takalar menjadi satu-satunya MGMP yang mendapatkan bantuan dana *block grand* dari pemerintah.

Dana bantuan tahun 2017 ini digunakan untuk kegiatan peningkatan kemampuan penelitian soal dan pendidikan karakter dalam pengembangan karir guru di MGMP Sejarah Kabupaten Takalar. Kegiatan berlangsung dalam dua tahap, yaitu tahap

pertama dengan kegiatan penelitian soal, dan tahap kedua dengan kegiatan penguatan pendidikan karakter dan pengembangan karir guru. Tahap pertama berlangsung hari hari, yaitu mulai minggu ke 1 s.d. minggu 3 Mei 2017. Setiap pertemuan berlangsung selama 10 jam (1 jam = 45 menit), yaitu pukul 08.00-17.00 wita. Jadi total jam untuk pertemuan pertama adalah 6 Hr X 10 JP = 60 Jam.

Tahap kedua berlangsung selama lima hari, yaitu minggu ke 3 s.d. minggu ke 4 Mei 2017, dengan pola 8 – 9 jam /hari. Jadi total jam untuk kegiatan tahap kedua adalah 40 Jam. Dengan demikian, keseluruhan kegiatan menggunakan waktu 100 Jam. Struktur program dapat dilihat berikut ini :

KETERANGAN	MATERI	ALOKASI WAKTU
Tahap 1 (7 Pertemuan)	A. Penelitian Soal	5
	1. Praktik Analisis Kompetensi Dasar	2
	2. Praktik Penyusunan Indikator Soal	5
	3. Praktik Penyusunan Kisi-kisi	18
	4. Praktik Penyusunan Butir Soal Pilihan Ganda	2
	5. Praktik Penyusunan Butir Soal Uraian	4
	6. Praktik Telaah Butir soal	8
	7. Praktik Perbaikan Soal berdasarkan Hasil Telaah dan Finalisasi	4
	8. Praktik Penyusunan Kunci Jawaban untuk Soal Pilihan Ganda	8
	9. Praktik Penyusunan Pedoman Penskoran untuk Soal Uraian	2
	10. Praktik Penyusunan Pedoman Penilaian	2
	11. Praktik Penyusunan Format Lembar Jawaban	
Jumlah Jam Tahap 1		60 JP
Tahap 2 (5 Pertemuan)	B. Penguatan Pendidikan Karakter (PPK)	
	1. Kebijakan dan Konsep Dasar PPK	2
	2. PPK Berbasis Kelas	6
	3. PPK Berbasis Budaya Sekolah	2
	4. PPK Berbasis Masyarakat	2
	5. Penilaian dan Evaluasi PPK	2
	6. Desain Rencana Tindak Lanjut	2
	Peningkatan Karir Guru	
	1. Kebijakan Profesionalisme Guru dan Tenaga Kependidikan	2
	2. Perkembangan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru	8
	3. Perkembangan Pelaksanaan Pengembangan Karir Guru	8
	4. Rencana Tindak Lanjut	6
Jumlah Jam Tahap 2		40 JP
JUMLAH TOTAL JAM		100 Jam

Tahun 2018 sampai sekarang, pertemuan rutin MGMP tetap berjalan sesuai program yang disusun di setiap awal tahun. Kegiatan MGMP ini, telah banyak membantu guru-guru sejarah di Takalar, baik SMA maupun SMK dalam menghadapi tugas-tugas dan berbagai beban administrasi yang dihadapi guru yang semakin hari semakin bertambah.

Sejak tahun 2018, guru-guru sejarah yang terhimpun dalam MGMP Sejarah SMA Kabupaten Takalar mendapat uang transpor dari dana Bos di sekolah asal masing-masing peserta sebesar Rp.50.000 per bulan yang diterima setiap tiga bulan/triwulan. Dengan demikian, pertemuan atau kegiatan MGMP juga diadakan sekali dalam sebulan dan biasanya dilaksanakan di pekan pertama atau kedua serta disesuaikan dengan kondisi dan kesempatan pengurus dan anggota MGMP. Konsumsi di setiap pertemuan hanya mengandalkan swadaya pengurus dan anggota MGMP.

PENUTUP

Perbedaan antara KBK, KTSP dan K13 adalah KBK dan KTSP lebih kaku dengan persoalan materi karena garis silabus telah ditentukan dari pusat. Oleh karena itu, materi dikontrol penuh oleh pemerintah pusat. Terkadang materi sejarah lokal terabaikan, namun guru-guru sejarah tidak disibukkan oleh pemenuhan administrasi yang ribet. K13 dapat dikatakan kebalikan dari KBK dan KTSP karena materi ditentukan sepenuhnya oleh guru sejarah. Di sisi lain guru sejarah juga disibukkan dengan pemenuhan administrasi. Selain itu, jumlah jam pengajaran sejarah lebih banyak pada K13. Kelas peminatan diberikan kuota jam pelajaran, yakni 5 (lima) jam pelajaran dalam satu minggu dengan rincian 3 (tiga) jam untuk mata pelajaran sejarah peminatan dan 2 (dua) jam sejarah wajib. Sedangkan kelas nonpeminatan

diberikan 2 (dua) jam pelajaran untuk sejarah wajib.

Kerumitan administrasi yang semakin meningkat pada penerapan K13 menyebabkan para guru sejarah benar-benar disibukkan dengan tuntutan administratif sehingga konten pembelajaran sering dilupakan. Meskipun guru sejarah membutuhkan penyesuaian, tetapi dalam pelaksanaan kurikulum itu terjadi beberapa kali revisi. Kondisi itulah yang membuat pembelajaran tidak begitu maksimal pada masa awal penerapan K13.

Secara konseptual, guru sejarah tingkat SMA di Takalar tidak keberatan dengan situasi perubahan kurikulum yang dapat dijelaskan argumentasinya dengan kapasitas pengetahuan sejarah yang mereka miliki. Para guru sejarah cukup paham untuk menjelaskan fenomena perubahan tersebut di tengah perubahan sosial yang semakin kritis dengan sumber informasi yang semakin terbuka. Keterbukaan sumber-sumber informasi memungkinkan terjadinya perubahan teori-teori sejarah yang lama. Munculnya fakta-fakta baru diiringi perkembangan metodologi dan kesadaran masyarakat ilmiah untuk menulis sejarah dalam perspektif keindonesiaan, yang tidak semata bertumpu pada perspektif kolonial dengan tetap memenuhi batasan ilmiah yang empirik, sistematis, dan rasional.

Kesemrawutan perubahan kurikulum yang disertai dengan syarat administrasi yang dibebankan kepada guru, membawa dampak tidak maksimalnya perhatian guru dalam hal konten pembelajaran. Kurikulum seolah menekankan target pencapaian administrasi dibandingkan dengan pencapaian tingkat pemahaman siswa terhadap suatu materi pelajaran. Hal ini ditandai dengan dipentingkannya pencatatan kronologis pembelajaran yang mengabaikan kreativitas guru dalam mendorong siswa untuk meminati

dan memahami pelajaran sesuai dengan kondisi mereka.

Namun beberapa waktu terakhir, guru sejarah sudah bisa menyesuaikan diri dengan tuntutan administrasinya. Hal ini tidak terlepas dari peran MGMP yang diaktifkan secara baik di daerah Takalar. MGMP Sejarah SMA Kabupaten Takalar selama kurang lebih empat belas tahun (2004--2018) menjadi tumpuan guru-guru sejarah dalam berbagi info, perangkat atau administrasi pembelajaran, bahan ajar, dan pengalaman.

Saran

- Pembelajaran sejarah melalui praktik lapangan harus digalakkan oleh pemerintah provinsi dan dituangkan dengan pendanaan melalui anggaran BOS.
- Mengusulkan kepada pemerintah untuk memasukkan jam penyusunan perangkat pembelajaran pada tuntutan 24 jam itu. Dengan kata lain, guru dituntut mengajar 20 jam dan sisa 4 jam digunakan untuk menyusun perangkat pembelajaran. Jadi 24 jam itu sudah termasuk tuntutan mengajar dan penyusunan perangkat.
- Pemerintah provinsi diharapkan memperhatikan pengembangan kompetensi guru dengan memberikan pelatihan-pelatihan.
- Pemerintah daerah memperbanyak kegiatan atau lomba sejarah untuk siswa tingkat SMA.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. 2016. "Kurikulum." *Www.Kbbi.Kemdikbud.Go.Id*. Retrieved July 2, 2021 (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kurikulum>).
- Harsution, Vian. 2016. "Lesson Study Dan Implikasinya Terhadap Pembelajaran Berbasis Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan." Pp. 189–96 in *Proceedings of International Conference on Economics, Education and Cultural Development of Moslem Society in ASEAN, Vol 1*. purwokerto: ejournal.iainpurwokerto.ac.id.
- Henk Schulte Nordholt, Bambang Purwanto and Ratna Saptari, ed. 2008. *Memikir Ulang Historiografi Indonesia In Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia*. Jakarta: Obor Indonesia - KITLV Jakarta.
- Hodgkin, Katharine, and Susannah Radstone. 2014. *Contested Pasts : The Politics of Memory*. New Brunswick: Transaction Publishers.
- Husain, Sarkawi B. 2014. *Sejarah Sekolah Makassar: Di Tengah Kolonialisme, Pertumbuhan Pers, Dan Pembentukan Elite Baru, Periode 1876-1942*. Makassar: Innawa.
- Julaeha, Siti. 2019. "Problematisasi Kurikulum Dan Pembelajaran Pendidikan Karakter." *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, [SL] 7(2):157–82.
- Muhammedi. 2016. "Perubahan Kurikulum Di Indonesia : Studi Kritis Tentang Upaya Menemukan Kurikulum Pendidikan Islam Yang Ideal." *Raudhah* Vol. IV:No. 1: Januari – Juni.
- Mulyasa, E. 2002. *Kurikulum Berbasis Kompetensi : Konsep, Karakteristik, Dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Pashuto, V. T. 1981. "The Significance of History (Predominantly as Taught in School) in Shaping the 20th - Century Individual." *Internationale Schulbuchforschung* Vol. 3:No. 1 (1981), pp. 37-46.

- Priyadi. 2014. *Sejarah Lokal, Konsep, Metode, Dan Tantangan*. Yogyakarta: Ombak.
- Sarita Pawiloy dkk. 1981. *Sulawesi Selatan Sejarah Pendidikan*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Trouillot, Michel-Rolph. 2015. *Silencing the Past : Power and the Production of History*. Boston, Mass: Beacon Press.
- Wahyuni, Fitri. 2015. "Kurikulum Dari Masa Ke Masa: Telaah Atas Pentahapan Kurikulum Pendidikan Di Indonesia." *Al-Adabiya* Vol 10:No. 2 Juli – Desember.
- Wineburg, Sam. 2006. *Berpikir Historis : Memetakan Masa Depan, Mengajarkan Masa Lalu*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.